



**RELOKASI, BAGIAN DARI REVITALISASI**

# Wajah Baru Malioboro, Harapan Baru

**MALIOBORO** sebagai jantung Kota Yogyakarta kini memasuki babak baru, dengan wajah dan tampilan baru, yang tentu saja disertai harapan baru dari seluruh masyarakat Malioboro maupun warga DIY umumnya, yakni Malioboro yang semakin ramah, nyaman, aman, menarik, manusiawi, berbudaya, *ngrejekeni*, sekaligus tetap memegang teguh filosofi yang terkandung di kawasan tersebut.

Relokasi atau pemindahan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro yang mulai dilakukan saat ini, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya revitalisasi atau penataan kembali kawasan Malioboro. Hal itu terkait keputusan Pemda DIY untuk mengusulkan Sumbu Imajiner yang sarat makna filosofi tersebut menuju warisan budaya dunia. Usulan tersebut sudah diajukan ke Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) melalui UNESCO sejak 2019.

Sumbu Imajiner atau bentang garis dari Laut Selatan, Panggung Krayak, Kraton Yogyakarta, Malioboro, Tugu Yogyakarta hingga Gunung Merapi merupakan tata ruang Yogyakarta. Selain itu, Sumbu Imajiner atau Sumbu Filosofi itu juga melambangkan konsep Manunggaling Kawula Gusti yang memiliki filosofi keselarasan, keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan jagad seisinya.

"Relokasi PKL dilakukan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penataan kawasan Malioboro dalam mengonngong diukunya Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda oleh UNESCO. Dalam relokasi PKL ini kami menyiapkan dua tempat yaitu di eks Gedung Bioskop Indra yang sekarang bernama Teras Malioboro 1 dan eks Gedung Dinas Pariwisata (DI) Teras Malioboro 2). Adapun jumlah PKL yang terdapat akan dipindahkan ke Teras Malioboro 1

dan Teras Malioboro 2 ada 1.638 PKL," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Dgs K Baskara Aji MM kepada KR di Repathih, Yogyakarta, pekan kemarin.

Disampaikan, revitalisasi kawasan Malioboro tidak semata-mata secara fisik akan mengubah tampilan yang ada. Tetapi tatanan yang baru itu justru akan lebih mengutamakan pada satu kearifan lokal, keadilan, kenyamanan hidup, kehidupan dan penghidupan semua pelaku usaha maupun masyarakat luas yang biasanya mengpresiasi kawasan Malioboro.

Baskara Aji mengatakan, relokasi PKL Malioboro selain bisa memberikan kepastian tempat usaha bagi para PKL, diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemda DIY maupun Pemkot Yogyakarta akan mengupayakan agar Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2 dikenal luas wisatawan. Salah satunya dengan memasang rambu-rambu informasi menuju dua spot berbelanja baru tersebut. Hal itu supaya wisatawan dengan mudah bisa menemukan lokasi para PKL berjalan. Untuk itu pihaknya meminta kepada para pedagang untuk tidak perlu terlalu khawatir.

"Saya kira menjadi tugas pengelola dalam hal ini Diakop UKM dan pengelola Malioboro untuk bisa memberikan informasi yang jelas di masyarakat terkait adanya relokasi. Supaya mereka bisa tahu di mana mereka bisa belanja. Adapun soal adanya kekhawatiran pedagang bakal kalah bersaing dengan pedagang di Pasar Beringharjo, saya kira sebelum adanya relokasi, mereka berharap relokasi dilakukan terhadap semua pedagang tanpa terkecuali dan lokasi sebelumnya tidak digunakan oleh pedagang-pedagang baru, pemilik toko, atau pemodal besar. Tempat relokasi juga diharapkan memiliki pelayanan usaha, dayaampung, mampu menunjang keberlanjutan usaha, dan didukung promosi oleh Pemerintah, sehingga kegiatan ekonomi bisa tetap berlanjut, bahkan meningkat."

Para PKL pada dasarnya bisa menerima pemindahan tersebut. Mereka berharap relokasi dilakukan terhadap semua pedagang tanpa terkecuali dan lokasi sebelumnya tidak digunakan oleh pedagang-pedagang baru, pemilik toko, atau pemodal besar. Tempat relokasi juga diharapkan memiliki pelayanan usaha, dayaampung, mampu menunjang keberlanjutan usaha, dan didukung promosi oleh Pemerintah, sehingga kegiatan ekonomi bisa tetap berlanjut, bahkan meningkat."

"Saat sosialisasi sudah tersirat dalam gambar desain tersebut suatu saat PKL Malioboro akan berpindah dari Malioboro. Tapi masih tetap berada di kawasan Malioboro. Akhirnya kami menerima dengan syarat dan menjadi pertimbangan-perimbangan Pemerintah dalam melaksanakan tahapan-tahapan relokasi," terang Ketua Paguyuban PKL dengan jumlah anggota terbesar itu, Rudyarto berharap, setelah relokasi ke tempat yang baru kunjungan bisa meningkat. "Jadi memang untuk kebaikan kita agar bisa lebih baik. Baik mengenai

pemilik toko dan Pemda DIY. Untuk itu relokasi harus dilakukan, karena hal itu merupakan jalur pedestrian Malioboro, bukan milik PKL. Untuk itu, setelah dilakukan pemindahan PKL akan dijaga bangun sepanjang Malioboro.

Salah satu caranya dengan dipindah dan dikembalikan kepada yang seharusnya. Seperti dibersihkan dari sampah-sampah bagian besar atau lebih. Adapun untuk pengembalian fasad-fasad sisi luar dari toko-toko sambil jalan juga akan dilakukan. Walaupun sebelumnya untuk fasad di toko-toko itu sebagian besar hanya tertutup batho.

Karena dari hasil kajian dan identifikasi Dinas Kebudayaan DIY, sebagian besar atau lebih bangunan di kawasan Malioboro masuk kategori cagar budaya. Sedangkan bangunan modern atau noncagar budaya tetap akan dibuat selaras dan serasi supaya tidak menjadi bangunan asing di antara bangunan yang lain.

Ketua Paguyuban PKL Tri Dharma Rudyarto menyatakan, awalnya pihaknya nyatakan keberadaan PKL bisa menjadi bagian dari ikon pariwisata Malioboro. Tapi akhirnya pihaknya bisa memahami. Semua itu berangkat dari konsep pedestrian kawasan Malioboro atau revitalisasi dari Tugu sampai Panggung Krayak. Di mana sosialisasi konsep besar relokasi PKL sudah dimulai sejak 2014, bahkan sebelum munculnya kawasan pedestrian di sisi Timur Malioboro.

Para PKL pada dasarnya bisa menerima pemindahan tersebut. Mereka berharap relokasi dilakukan terhadap semua pedagang tanpa terkecuali dan lokasi sebelumnya tidak digunakan oleh pedagang-pedagang baru, pemilik toko, atau pemodal besar. Tempat relokasi juga diharapkan memiliki pelayanan usaha, dayaampung, mampu menunjang keberlanjutan usaha, dan didukung promosi oleh Pemerintah, sehingga kegiatan ekonomi bisa tetap berlanjut, bahkan meningkat."

"Menempati tempat yang baru itu tidak gampang atau tidak mudah dalam artian membutuhkan waktu untuk menciptakan pesai yang baru. Untuk itu kami berharap kepada Pemerintah melalui dinas terkait bisa ada sinergi supaya di tempat yang baru banyak kunjungan wisatawan. Dengan cara



PKL mulai menempati Teras Malioboro.

KR-Franc Boediakumanto

legalitas, kepastian usaha dan sebagainya karena selama ini bukan salah waktu tapi posisinya salah tempat. Salah waktu karena sudah jualan di sini selama berpuluh-puluh tahun. Tapi setelah tahu legalitasnya ternyata tempat ini milik orang, bukan milik Pemda.

"Saya tilip pesan kepada Pemerintah, tolong ada keberpihakan kepada ekonomi kecil. Apabila menemui masalah di shelter baru atau sementara Pemerintah segera bertindak sebelum terjadi masalah sosial yang berat," ungkapnya.

Hal senada diungkapkan Ketua Paguyuban PKL Palmari Siamet Santoso. Selaku PKL Malioboro, Siamet mengaku pernah diundang Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta terkait rencana relokasi PKL Malioboro. Setelah menerima sosialisasi dari Disbud Kota langsung disosialisasikan ke anggotanya. Secara garis besar anggotanya bisa memahami Program Pemkot Yoga dan Pemda DIY. Pihaknya sadar selama ini menempati tempat yang tidak memiliki legalitas (hak kepemilikan). Karena ruang yang mereka tempati milik toko.

"Menempati tempat yang baru itu tidak gampang atau tidak mudah dalam artian membutuhkan waktu untuk menciptakan pesai yang baru. Untuk itu kami berharap kepada Pemerintah melalui dinas terkait bisa ada sinergi supaya di tempat yang baru banyak kunjungan wisatawan. Dengan cara

memberikan promosi atau memasarkan kepada para wisatawan termasuk masyarakat umum," imbuhnya.

Siamet Santoso menambahkan, anggota paguyuban juga cukup memahami dan bisa menerima untuk berpindah ke tempat yang lebih terjamin legalitasnya.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Sri Nurkayatswi menyampaikan, para PKL akan mendapatkan fasilitas kebutuhan primer seperti listrik, air, Internet, tempat sampah serta diberikan lapak gratis di tempat baru.

"Tidak hanya sekadar menyediakan dan memfasilitasi PKL, kami tentu akan melakukan pembinaan sampai fasilitas gratis ongkos kirim (ongkir) yang sedang dalam proses. Kami akan membantu pemasaran PKL di era transformasi digital dengan penjualan secara online, asal ada komitmen bersama baik Pemerintah maupun pengelola," tuturnya.

Swi mengakui, telah ada kesepakatan bersama bahwa tempat ini merupakan ruang usaha bagi para PKL yang selama ini menempati sepanjang Malioboro. Konsep lapaknya pun bervariasi sudah diatur sedemikian rupa baik untuk memajang (display) produk dan tempat penyimpanan. Masyarakat itu pun bersedia akan lebih nyaman berbelanja oleh-oleh baik kerajinan, fashion dan kuliner. Sehingga hadirnya gedung tiga lantai (Teras 1 Malioboro) akan

lebih memberikan kenyamanan bagi semua pihak. Tidak hanya pengunjung tetapi juga pelaku usaha itu sendiri serta perlindungan bagi konsumen. Pihaknya juga akan terus melakukan evaluasi ke depannya.

Para PKL Malioboro mulai boiyongan ke tempat relokasi pada Selasa (1/2), menempati Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Sebagai pedagang, harapan para PKL tidak muluk-muluk karena yang terpenting gagasan bisa laku.

Kepala Dinas Kebudayaan Kota Yogyakarta Yetti Maranti mengatakan, para PKL sudah diperkenankan berjalan di lapak baru Teras Malioboro. Ada sekitar 1.040 PKL penjual aksesoris dan kuliner lesehan di Malioboro yang bakal menempati Teras Malioboro 2. Dalam seminggu, semua PKL Malioboro diharapkan sudah beralih ke tempat baru. Karena pada 8 Februari harus sudah bersih semua.

"Setelah semua PKL menempati lapak barunya, Pemkot Yogyakarta akan melakukan pengawasan dan evaluasi. Termasuk praktik jual beli lapak yang dimungkinkan terjadi. Kami ada kontrol, memang sudah kerja sama dengan pedagang. Kalau ada yang jual (lapak) nanti kami evaluasi terus. Semua itu untuk memastikan tidak boleh ada yang berpindah tangan, mengingat semua itu merupakan aset negara," tandas Yetti Maranti.

(Riyana Ekawati)



PKL Malioboro di tempat baru.

KR-Franc Boediakumanto

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 02 Juli 2026  
Kepala

**lg. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005